

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu isu sentral dalam perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Konsep tersebut mengukur sejauh mana pertumbuhan ekonomi suatu negara setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan kapasitas produksinya, baik dalam menghasilkan barang maupun jasa, yang didorong oleh peningkatan jumlah serta kualitas faktor-faktor produksi yang dimiliki (Sinaga, 2025).

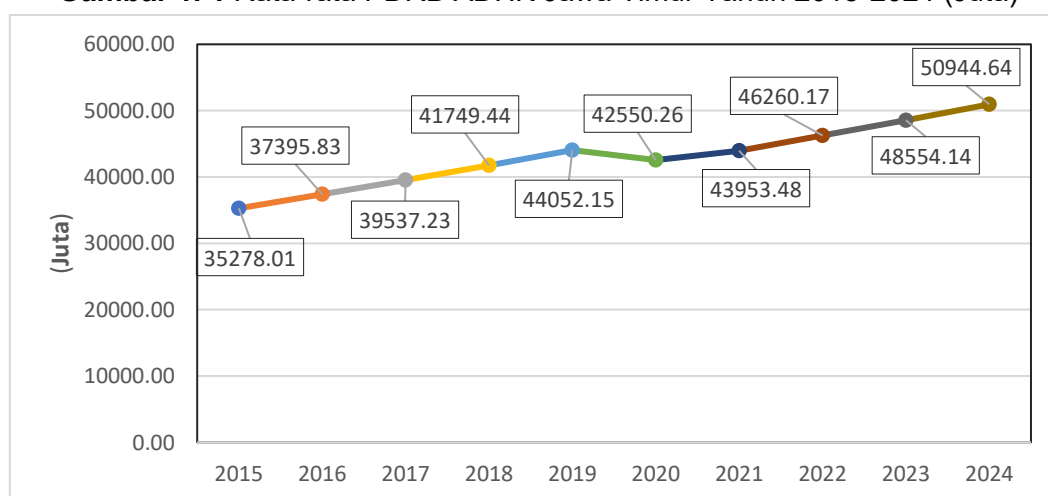
Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai ukuran pokok untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan di tingkat nasional maupun regional, karena indikator ini menunjukkan tingkat kapasitas produksi, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan kelangsungan kegiatan ekonomi dalam perspektif jangka panjang. Dalam konteks pembangunan daerah, evaluasi pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), melainkan juga pada kemampuan wilayah untuk mewujudkan distribusi pendapatan yang merata, memperbesar peluang pekerjaan, serta memanfaatkan sumber daya secara optimal. Analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak hanya bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi ekonomi suatu daerah, tetapi juga berperan penting dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif serta potensi untuk dikembangkan pada masa yang akan datang (Greshinta *et al.*, 2026).

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi sasaran utama dalam agenda pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia, terutama di tengah eskalasi tantangan struktural seperti disparitas antarwilayah, keterbatas-

an lapangan kerja, dan beban fiskal daerah. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan, investasi yang produktif serta belanja publik yang berkualitas merupakan syarat mendasar. Dengan demikian, isu krusial yang muncul adalah bagaimana strategi pembangunan dapat mengintegrasikan elemen-elemen ini untuk mengatasi hambatan struktural, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya mendorong peningkatan output, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan di tingkat daerah (World Bank Group, 2016).

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola serta mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif, sehingga dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Ghoisa *et al.*, 2026). Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menegaskan bahwa peningkatan ekonomi, diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), bergantung pada kemajuan faktor-faktor produksi utama, yakni modal, tenaga kerja, dan teknologi (Hejazziey, 2019).

Gambar 1. 1 Rata-rata PDRB ADHK Jawa Timur Tahun 2015-2024 (Juta)



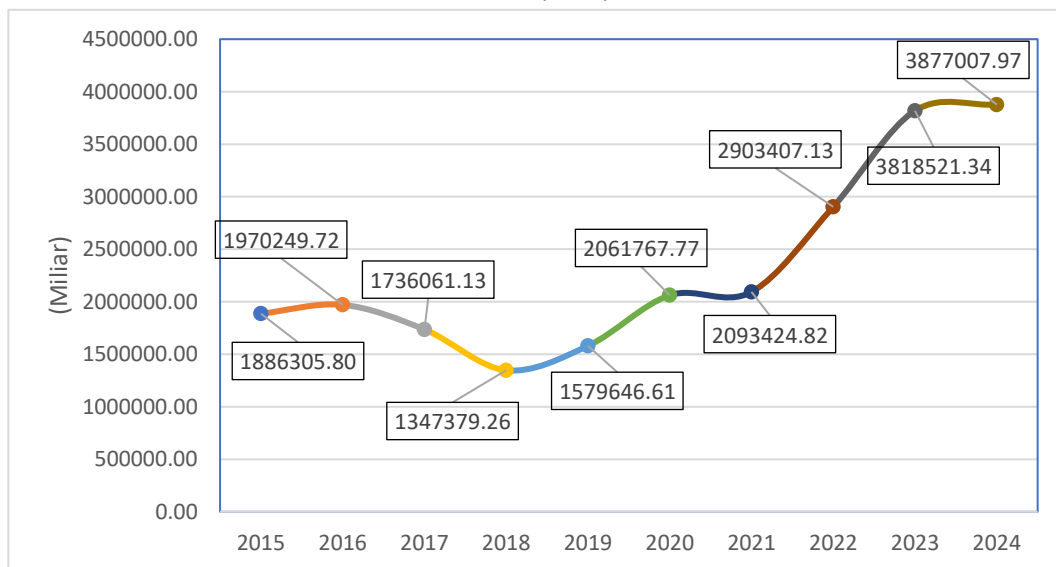
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Jawa Timur tahun 2015–2024, terlihat bahwa PDRB cenderung mengalami peningkatan meskipun sempat berfluktuasi. Rata-rata PDRB meningkat dari 35.278,01 juta pada tahun 2015 menjadi 37.395,83 juta pada tahun 2016, kemudian terus naik hingga mencapai 44.052,15 juta pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi barang dan jasa di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang cukup baik sebelum pandemi. Pada tahun 2020, mengalami penurunan menjadi 42.550,26 juta akibat perlambatan aktivitas ekonomi yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 43.953,48 juta, kemudian terus naik menjadi 46.260,17 juta pada tahun 2022 dan 48.554,14 juta pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mulai pulih seiring membaiknya kondisi perekonomian. Pada tahun 2024, kembali meningkat menjadi 50.944,64 juta, yang merupakan nilai tertinggi selama periode penelitian. Secara keseluruhan, tren tersebut menunjukkan bahwa perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang semakin baik. Peningkatan tersebut mencerminkan bertambahnya output riil yang dihasilkan sehingga menjadi indikator adanya peningkatan kinerja ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Investasi merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan, akumulasi modal melalui investasi merupakan faktor utama yang dapat meningkatkan output dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Oleh

karena itu, peningkatan realisasi investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.

Gambar 1. 2 Rata-rata Realisasi Investasi (PMDN & PMA) Jawa Timur 2015-2024 (Juta)



Sumber : BKPM, diolah (2025)

Gambar 1.2 data berdasarkan grafik rata-rata realisasi investasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Timur selama periode 2015–2024, terlihat bahwa nilai investasi mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode penelitian. Pada tahun 2015 rata-rata realisasi investasi tercatat sebesar Rp1.886.305,80 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp1.970.249,72 miliar pada tahun 2016. Selanjutnya, rata-rata investasi mengalami penurunan selama periode 2017–2018 hingga mencapai titik terendah sebesar Rp1.347.379,26 miliar pada tahun 2018. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya perlambatan aktivitas investasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi domestik maupun global serta kehati-hatian investor dalam melakukan penanaman modal. Memasuki tahun 2019, rata-rata realisasi investasi kembali meningkat menjadi Rp1.579.646,61 miliar dan terus mengalami kenaikan pada

tahun 2020 sebesar Rp2.061.767,77 miliar serta tahun 2021 sebesar Rp2.093.424,82 miliar. Meskipun pada periode tersebut perekonomian menghadapi dampak pandemi COVID-19, peningkatan investasi menunjukkan adanya upaya pemerintah melalui berbagai kebijakan pemulihan ekonomi dan pemberian insentif investasi yang mampu menjaga minat investor.

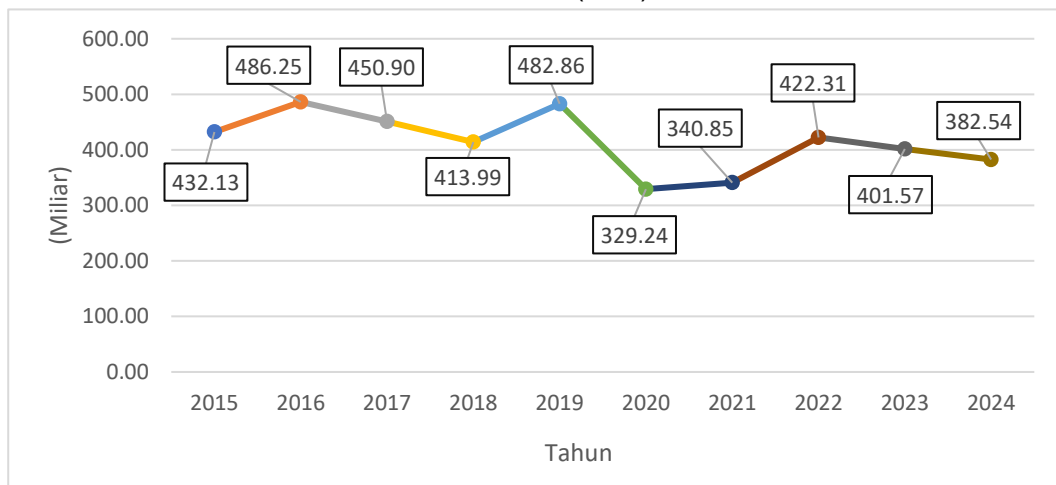
Peningkatan investasi menjadi semakin signifikan pada periode 2022–2024. Rata-rata investasi mencapai Rp2.903.407,13 miliar pada tahun 2022, kemudian meningkat tajam menjadi Rp3.818.521,34 miliar pada tahun 2023 dan kembali naik menjadi Rp3.877.007,97 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan semakin membaiknya iklim investasi di Provinsi Jawa Timur, didukung oleh pemulihan aktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan perizinan melalui kebijakan pemerintah, serta meningkatnya kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur. Secara keseluruhan, rata-rata realisasi investasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Timur memiliki tren meningkat selama periode penelitian, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2017–2018. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Jawa Timur tetap menjadi salah satu daerah tujuan investasi yang potensial. Peningkatan investasi tersebut diharapkan mampu mendorong kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur.

Investasi berperan dalam meningkatkan volume produksi barang dan jasa, di mana dana tersebut dialokasikan untuk memperoleh barang modal yang diperlukan dalam proses produksi. Berdasarkan sumber modal yang tersedia, investasi diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu Penanaman Modal

Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi secara signifikan memengaruhi tingkat investasi, yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Adanya keterkaitan dinamis antara investasi sebagai pendorong produksi dan indikator ekonomi seperti PDRB, di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi cenderung mendorong lebih banyak investasi, sehingga memperkuat siklus produktivitas regional (Sianturi, 2025).

Belanja modal dapat diartikan sebagai alokasi dana yang digunakan untuk pengadaan, pembangunan, atau peningkatan aset tetap berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk mendukung kelancaran operasional pemerintahan (Rhima Kusuma et al., 2024). Hubungan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui peningkatan aktivitas pembangunan daerah. Ketika alokasi belanja modal meningkat, pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami kenaikan karena belanja tersebut memberikan dampak positif terhadap perekonomian wilayah. Pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal memungkinkan pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik yang mendukung kegiatan ekonomi, sehingga mampu meningkatkan produktivitas masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal daerah yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan dan mengelola perekonomian melalui pengaturan pendapatan serta belanja daerah (Hakim & Suparta, 2022).

Gambar 1. 3 Rata-rata Realisasi Belanja Modal (APBD) Jawa Timur Tahun 2015-2024 (Juta)



Sumber : DJPK, diolah (2025)

Berdasarkan data pada tabel 1.3, rata-rata Realisasi Belanja Modal APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015–2024, terlihat bahwa belanja modal mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Kemudian meningkat dari Rp432,13 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp486,25 miliar pada tahun 2016. Selanjutnya, menurun menjadi Rp450,90 miliar pada tahun 2017 dan Rp413,99 miliar pada tahun 2018, kemudian kembali meningkat hingga mencapai Rp482,86 miliar pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal pemerintah daerah belum stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, rata-rata belanja modal mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi Rp329,24 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial, serta program pemulihan ekonomi. Pada tahun 2021, belanja modal mulai meningkat menjadi Rp340,85 miliar, kemudian kembali naik menjadi Rp422,31 miliar pada tahun 2022 seiring membaiknya kondisi perekonomian dan meningkatnya kembali belanja pembangunan. Meskipun rata-rata belanja modal kembali mengalami penurunan menjadi

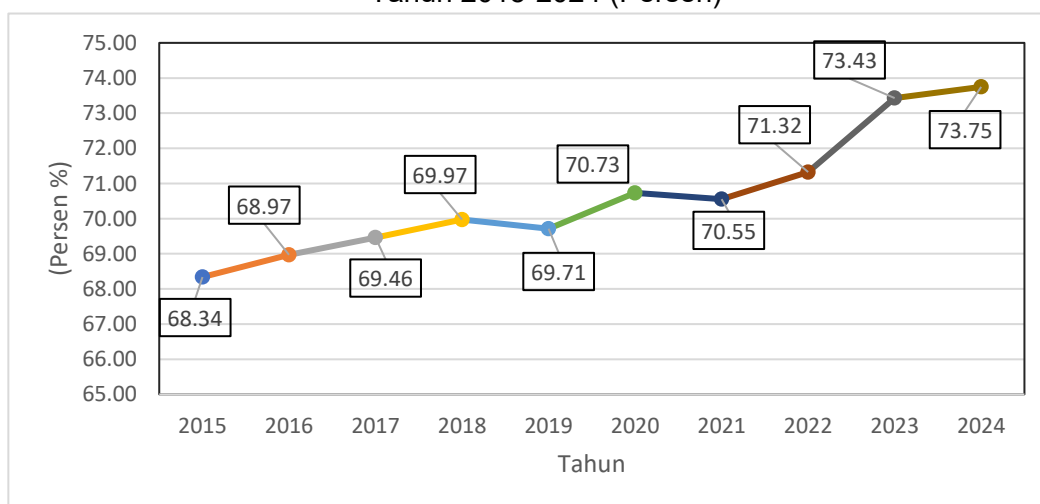
Rp401,57 miliar pada tahun 2023 dan Rp382,54 miliar pada tahun 2024, secara umum pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur dan aset tetap. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa besarnya belanja modal sangat dipengaruhi oleh kondisi fiskal daerah, kebijakan penganggaran, serta prioritas pembangunan pada masing-masing periode.

Selain investasi, belanja pemerintah juga memiliki peran penting sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendorong pembangunan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah daerah memiliki potensi strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Annisa et al., 2024). Teori *Harrod-Domar* dan *Solow* memprediksi investasi positif terhadap pertumbuhan melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tumbuh 6,66% pada 2025, serta belanja modal APBD mencapai Rp15 triliun pada 2023 untuk infrastruktur (Antara & I., 2026). Penyerapan tenaga kerja juga sering tidak signifikan meskipun teori Lewis menjanjikan transfer dari sektor tradisional ke modern (Rhima Kusuma et al., 2024). Fenomena ini menghambat pertumbuhan berkelanjutan, di mana PDRB Jawa Timur mencapai Rp3.403,17 triliun pada 2025 dengan laju 5,85%, tapi ketimpangan muncul karena investasi tidak merata antar kabupaten/kota, menurunkan PDRB per kapita di daerah pelosok. Dampaknya termasuk pengangguran tersembunyi di sektor pertanian (10,74% struktur ekonomi) dan ketergantungan pada konsumsi rumah tangga, mengancam SDGs seperti pengurangan kemiskinan dan kesetaraan. Masalahnya adalah stagnasi pertumbuhan inklusif di Jawa Timur, dengan investasi PMA/PMDN fluktuatif (misalnya penurunan 41,72% PMA pada 2007 akibat ketidakstabilan), belanja modal APBD tidak terealisasi optimal, dan penyerapan tenaga kerja rendah

meskipun populasi usia kerja tinggi, menyebabkan pengangguran 282 ribu tambahan pada 2025. Hal ini bertentangan dengan target pertumbuhan 4,9-5,7% pada 2026, memerlukan analisis empiris untuk kebijakan (Rahmawati *et al.*, 2024).

Tenaga kerja memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara parsial maupun simultan bersama variabel investasi dan pengeluaran pemerintah. Hal ini menandakan bahwa kualitas dan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sektor ekonomi dapat meningkatkan produktivitas serta memperkuat daya saing daerah (Ganar *et al.*, 2021).

Gambar 1. 4 Rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Timur Tahun 2015-2024 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (2025)

Berdasarkan gambar 1.4 data rata-rata TPAK kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2015–2024 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 rata-rata TPAK sebesar 68,34%, kemudian meningkat menjadi 68,97% pada tahun 2016 dan 69,32% pada tahun 2017. Selanjutnya meningkat menjadi 69,52% pada tahun 2018, namun sedikit menurun menjadi 69,29% pada tahun 2019 dan 68,64% pada tahun 2020. Penurunan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan berkurangnya aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja.

Setelah pandemi mulai terkendali, rata-rata TPAK kembali meningkat menjadi 69,36% pada tahun 2021, 69,85% pada tahun 2022, 71,01% pada tahun 2023, dan mencapai 71,22% pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pemulihan pasar tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, peningkatan TPAK belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesempatan kerja di seluruh kabupaten/kota sehingga masih diperlukan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas dan penyerapan tenaga kerja agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan investasi dapat memperkuat aktivitas produksi dan memperluas kesempatan kerja, sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil (Annisa et al., 2024). Investasi dan penyerapan tenaga kerja seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara positif melalui akumulasi modal dan peningkatan produktivitas. Namun, realitas di Jawa Timur menunjukkan ketidaksesuaian, di mana investasi justru berpengaruh negatif signifikan terhadap PDRB meskipun nilainya meningkat menjadi Rp146,955 miliar pada 2023, sementara penyerapan tenaga kerja positif namun tidak selalu optimal dengan jumlah angkatan kerja mencapai 24,76 juta orang pada Agustus 2025. Sebagian besar jurnal di Indonesia menganalisis PDRB sebagai variabel independen terhadap variabel seperti kemiskinan, IPM, atau pengangguran di tingkat provinsi. Namun penelitian belum banyak yang memasukkan rasio kontribusi PDRB terhadap total PDB nasional sebagai variabel yang dapat menunjukkan kontribusi ekonomi provinsi terhadap perekonomian nasional (Zaidan Albihaqi, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Bancin dan Murtala menemukan bahwa investasi, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tetapi secara parsial beberapa variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara investasi, belanja pemerintah, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi masih memiliki hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dikaji lebih lanjut dengan pendekatan dan wilayah penelitian yang berbeda (Bancin & Murtala, 2020).

Sementara itu, penelitian Putri menunjukkan bahwa investasi domestik, belanja modal pemerintah, tenaga kerja, dan infrastruktur memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Pulau Jawa. Hasil ini menunjukkan bahwa investasi dan belanja modal pemerintah dapat meningkatkan aktivitas ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi dan pembangunan infrastruktur. Namun penelitian tersebut masih menggunakan data periode lama dan belum secara khusus meneliti aspek pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat daerah tertentu (Ganar *et al.*, 2021).

Selain itu, beberapa penelitian juga lebih banyak meneliti hubungan investasi, belanja pemerintah, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum di tingkat nasional atau provinsi lain, seperti Aceh dan Sulawesi. Penelitian tersebut belum secara khusus meneliti hubungan variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, terutama pada tingkat kabupaten/kota dalam satu provinsi tertentu (Safarida & Rahmawati, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Terdapat perbedaan hasil penelitian (*research inconsistency*) terkait pengaruh investasi, belanja pemerintah, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, sementara

penelitian lainnya menemukan hasil yang tidak signifikan. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi secara umum, sehingga kajian mengenai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya juga lebih banyak dilakukan pada tingkat nasional atau di provinsi lain, sehingga kajian yang secara khusus meneliti hubungan antara investasi, belanja modal pemerintah daerah, dan penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur masih belum banyak dilakukan. Penelitian terdahulu umumnya hanya menganalisis pengaruh masing-masing variabel secara terpisah, sehingga masih terbatas penelitian yang menggabungkan investasi, belanja modal pemerintah daerah, dan penyerapan tenaga kerja secara simultan dalam satu model penelitian untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tingkat daerah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis seberapa besar pengaruh investasi, belanja modal pemerintah daerah, dan penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur, baik secara parsial maupun simultan. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi kekuatan hubungan serta kontribusi masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tingkat daerah, sehingga dapat diketahui variabel mana yang memiliki pengaruh paling dominan. Hasil analisis ini diharapkan mampu menjelaskan sejauh mana ketiga faktor tersebut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan provinsi dengan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar

kedua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional setelah DKI Jakarta. Posisi ini menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Dengan struktur ekonomi yang beragam dan didominasi sektor riil seperti industri pengolahan dan perdagangan, dinamika pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menjadi indikator penting dalam melihat ketahanan dan kontribusi ekonomi daerah terhadap perekonomian nasional (Zaidan Albihaqi, 2025).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah investasi, belanja modal, dan penyerapan tenaga kerja secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

2. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
3. Untuk menganalisis pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
4. Untuk menganalisis pengaruh investasi, belanja modal, dan penyerapan tenaga kerja secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan di bidang ekonomi sumber daya manusia yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan dan publik. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan investasi, perencanaan belanja modal yang lebih produktif, strategi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi perencana pembangunan daerah (Bappeda), pengambil kebijakan fiskal, serta investor dalam menentukan strategi pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dari sisi kuantitas (pertumbuhan PDRB), tetapi juga dari aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk pengembangan studi lanjutan dengan variabel atau cakupan wilayah yang berbeda.

1.5 Batasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada tiga variabel independen/bebas (investasi, belanja modal, penyerapan tenaga kerja) dan satu variabel dependen/terikat (pertumbuhan ekonomi berkelanjutan), sehingga belum mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti infrastruktur, pendidikan, teknologi, dan kebijakan fiskal lainnya.
2. Variabel dalam penelitian ini adalah data realisasi investasi (PMDN & PMDA), realisasi belanja modal APBD, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS).
3. Lokasi penelitian ini adalah di Provinsi Jawa Timur.